

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PROVINSI PAPUA TENGAH

##### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1. Sejarah Singkat Provinsi Papua Tengah

Papua adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berada di bagian barat pulau Nugini, dan dikenal juga sebagai West New Guinea. Istilah “Papua” kadang-kadang juga merujuk pada seluruh pulau nugini, termasuk bagian timur yang merupakan bagian dari negara tetangga yaitu Papua Nugini. Beberapa orang lebih suka menggunakan istilah “Papua Barat” untuk membedakan provinsi ini dari Papua yang merupakan provinsi dibagian timur Indonesia.

Dalam permulaannya, wilayah ini dikenal sebagai Irian Barat dari tahun 1969 hingga 1973. Setelah itu, ketika melakukan peresmian tambang Freeport, Soeharto mengubah namanya menjadi Irian Jaya, yang tetap menjadi nama resmi hingga tahun 2002. Namun, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, provinsi ini mengalami perubahan nama menjadi Papua. Pada masa penjajahan Belanda, daerah ini disebut Nugini Belanda.<sup>55</sup>

<sup>55</sup> <https://papua.go.id/view-detail-page-254/sekilas-papua-.html>. Diakses pada Selasa 6 Juni 2023

Provinsi Papua Tengah adalah sebuah kawasan yang berada di pulau Papua. Provinsi ini dibentuk sebagai bagian dari perluasan wilayah provinsi Papua pada tahun 2022, sesuai dengan peraturan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2022. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 dari undang-undang yang sama, pusat administrasi Provinsi Papua Tengah terletak di Kabupaten Nabire.<sup>56</sup>

Kabupaten Nabire didirikan pada tanggal 10 September 1969 berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1969.<sup>57</sup> Nabire, seperti yang dikenal sekarang, adalah sebuah kabupaten yang terletak di wilayah geografis yang disebut sebagai "Leher Burung" di Pulau Papua. Bersama dengan perkembangannya, Nabire telah mengalami berbagai tahapan yang berbeda dalam rentang sejarahnya, mulai dari masa sebelum kedatangan Pemerintahan Belanda, masa pemerintahan Belanda, masa pemerintahan Republik Indonesia, hingga saat ini.

Tanah Papua menjadi bagian dari jajahan Belanda di Kepulauan Indonesia pada tahun 1828. Namun, Belanda baru menguasai Papua sepenuhnya pada tahun 1898. Pada waktu tersebut, Tweede Kamer, badan legislatif Belanda, memberikan persetujuan biaya sebesar F.15.000 Gulden untuk mendirikan pemerintahan di wilayah jajahannya. Pada waktu tersebut, Wilayah Papua, yang

<sup>56</sup> <https://www.daerahkita.com/artikel/352/daftar-nama-kabupaten-dan-kota-di-provinsi-papua-tengah> . Diakses pada Selasa, 6 Juni 2023

<sup>57</sup> <https://papua.bpk.go.id/kabupaten-nabire/> . Diakses pada Selasa, 6 Juni 2023

dikenal sebagai Irian Barat, dipecah menjadi dua bagian. Bagian pertama disebut Afdeling Noord Nieuw Guinea, yang berlokasi di wilayah Manokwari, dengan penguasaan wilayah yang meliputi daerah dari Jamursba (Kaap de Goede Hoop). Bagian kedua, West en Zuid Nieuw Guinea, terletak di Fak-Fak dan mencakup wilayah bagian barat hingga perbatasan timur Teluk Humboldt. Bagian ini juga mencakup Jamursba di bagian selatan dan meluas ke timur melintasi batas wilayah jajahan Inggris.

Pada tahun 1942, pemerintahan Belanda mendirikan sebuah distrik di Nabire yang dipimpin oleh seorang pejabat distrik bernama Somin Soumokil. Seiring berjalannya waktu, terjadi pemekaran distrik Dati II Paniai menjadi tiga kabupaten terpisah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996. Ketiga kabupaten tersebut, ialah:

1. Kabupaten Dati II Nabire dengan ibu kota di Nabire
2. Kabupaten Administrasi Paniai dengan ibu kota di Enarotali
3. Kabupaten Administratif Puncak Jaya dengan ibu kota di Mulia

Saat ini, kedua kabupaten administratif telah berubah statusnya menjadi wilayah otonom. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, terutama dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penekanan utama adalah pada penerapan konsep Otonomi Daerah yang luas, asli, dan bertanggung jawab.

Akibatnya, istilah "Kabupaten Dati II Nabire" dihapuskan dan digantikan dengan "Kabupaten Nabire " Perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah selanjutnya berfokus pada implementasi dua undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Selama periode ini, transformasi yang signifikan telah terjadi ketika Kabupaten Paniai dipisahkan dari Kabupaten Jayawijaya dan berkembang menjadi Kabupaten Nabire.<sup>58</sup>

#### 4.1.2. Visi Misi Provinsi Papua Tengah

##### 1. Visi

Visi merupakan kumpulan kata-kata yang mencerminkan impian dan nilai-nilai inti sebuah lembaga. Visi tersebut menggambarkan gambaran masa depan yang diinginkan oleh lembaga, yang didasarkan pada ide-ide yang dicetuskan oleh para pendiri. Visi ini didasarkan pada keyakinan bahwa lembaga harus memiliki tujuan yang jelas agar dapat mencapai kesuksesan.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> <https://regional.kompas.com/read/2022/06/29/170700578/asal-usul-nabire?page=all>. diakses pada hari Selasa, 6 Juni 2023

<sup>59</sup> [https://dpupr.banjarnegararakab.go.id/?page\\_id=358](https://dpupr.banjarnegararakab.go.id/?page_id=358) . diakses pada hari Selasa, 6 Juni 2023

Provinsi Papua Tengah memiliki visi yakni Membuka isolasi daerah untuk mewujudkan masyarakat Nabire secara berkelanjutan dari perspektif kebhinekaan, keadilan, kesejahteraan dan kemandirian.<sup>60</sup>

## 2. Misi

Misi adalah langkah-langkah atau proses yang perlu dijalani oleh departemen, lembaga, atau organisasi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Misi juga bisa diartikan sebagai representasi atau sasaran mengapa badan atau organisasi tersebut hadir di tengah masyarakat.<sup>61</sup> Dalam konteks Provinsi Papua Tengah, terdapat misi yang dimiliki, yaitu:

3. Mempercepat pembangunan dan ekspansi infrastruktur serta konektivitas wilayah dengan memprioritaskan perlindungan sipil, sambil tetap memperhatikan fungsi lingkungan hidup.
4. Menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, nyaman, dan damai. Meningkatkan perekonomian rakyat dengan mendorong efisiensi dalam sektor ekonomi rakyat.
5. Meningkatkan kapasitas dan kinerja mesin serta lembaga melalui penerapan praktik manajemen yang efektif dan

<sup>60</sup> <https://nabirekab.go.id/portal/visi-misi/> . diakses pada hari Selasa, 6 Juni 2023

<sup>61</sup> [https://dpupr.banjarnegararakab.go.id/?page\\_id=358](https://dpupr.banjarnegararakab.go.id/?page_id=358) . diakses pada hari Selasa, 6 Juni 2023

transparan, dengan fokus pada pembinaan dan pengembangan.<sup>62</sup>

6. Meningkatkan mutu tenaga manusia yang berada dalam kondisi sehat, berpengetahuan, berbudaya, kompetitif, dan memiliki kesadaran lingkungan.

#### 4.1.3 Geografi Kabupaten Nabire

Nabire terletak di antara 134°35' - 136°33' Bujur Timur dan 2°25' - 3°56' Lintang Selatan.<sup>63</sup> Kabupaten Nabire berada di wilayah Teluk Cenderawasih, Provinsi Papua, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Utara : Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen
- b. Selatan : Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Kaimana
- c. Timur : Kabupaten Paniai dan Kabupaten Waropen
- d. Barat : Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Kaimana

Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah merupakan wilayah otonom yang baru terbentuk di Pulau Papua, Indonesia. Ibu kota Papua Tengah terletak di Nabire, Kabupaten Nabire.

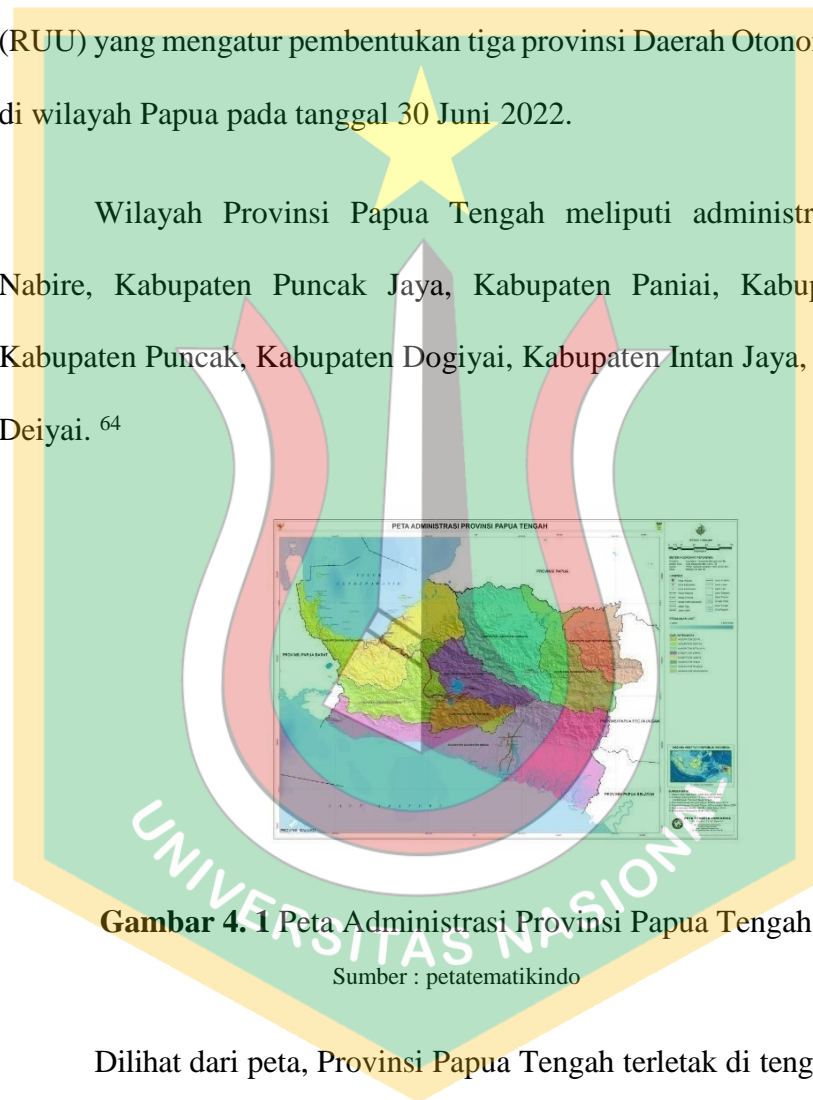
Nabire memiliki posisi yang sangat strategis dan berperan sebagai gerbang utama transportasi laut bagi kabupaten di wilayah Mee Pago. Papua

<sup>62</sup> <https://nabirekab.go.id/portal/visi-misi/> . diakses pada hari Selasa, 6 Juni 2023

<sup>63</sup> <https://regional.kompas.com/read/2022/07/03/152210678/profil-nabire-ibu-kota-provinsi-papua-tengah?page=all> . diakses pada hari Selasa, 6 Juni 2023

Tengah menjadi sebuah provinsi baru yang terbentuk melalui pemekaran wilayah dari Provinsi Papua. Penguahan status ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah menyetujui tiga rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur pembentukan tiga provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua pada tanggal 30 Juni 2022.

Wilayah Provinsi Papua Tengah meliputi administrasi Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai.<sup>64</sup>



**Gambar 4.1** Peta Administrasi Provinsi Papua Tengah

Sumber : petatematikindo

Dilihat dari peta, Provinsi Papua Tengah terletak di tengah Pulau Papua dan merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Peta Provinsi Papua Tengah

<sup>64</sup> Puspasari Setyaningrum. “profil provinsi papua tengah”, <https://regional.kompas.com/read/2022/07/02/183644778/profil-provinsi-papua-tengah?page=all>. diakses pada hari Rabu, 7 Juni 2023

menunjukkan bahwa wilayah ini terdiri dari beberapa kabupaten dan satu kota. Kabupaten-kabupaten tersebut meliputi Nabire, Paniai, Puncak, Mimika, Deiyai, Intan Jaya, dan Dogiyai.

Provinsi Papua Tengah adalah sebuah wilayah provinsi yang telah didirikan secara baru dan ditetapkan melalui UU Nomor 15 Tahun 2022. Ibu kota provinsi ini terletak di kota Nabire. Papua Tengah memiliki perbatasan dengan beberapa wilayah di sekitarnya. Di sebelah selatan, provinsi ini berbatasan dengan Laut Aru.

Sementara di sebelah timur, terdapat batas dengan kabupaten Tolikara, kabupaten Asmat, kabupaten Nduga, dan kabupaten Lanny Jaya. Bagian barat Papua Tengah berbatasan dengan dua kabupaten, yaitu Teluk Wondama dan Kaimana. Sedangkan di sebelah utara, terdapat batas dengan Teluk Cendrawasih, kabupaten Mamberamo, dan kabupaten Waropen.<sup>65</sup>

Luas wilayah Provinsi Papua Tengah pada masing-masing kabupaten/kota tersaji dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4. 1** Luas Wilayah dan Administrasi Pemerintah

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
1	Nabire	Nabire	11. 112,61
2	Paniai	Enarotali	4.989,51
3	Mimika	Timika	21.633,00
4	Dogiyai	Kamu	4.237,40
5	Intan Jaya	Sugapa	3.922,02

<sup>65</sup> <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/peta-provinsi-papua-tengah-dan-kekayaan-alamnya-20AiqA0L3ix/full> . diakses pada Rabu, 7 Juni 2023



6	Deiyai	Tigi	537,39
7	Puncak	Ilaga	8.055,00
8	Puncak Jaya	mulia	6.525,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Tahun 2021

Wilayah Kabupaten Nabire dapat diklasifikasikan menjadi tiga zona Argrosistem berdasarkan kondisi fisiknya:

- Zona dataran rendah dengan ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut.
- Zona dengan ketinggian sedang, yaitu berkisar antara 600 hingga 1500 meter di atas permukaan laut.
- Zona dataran tinggi, dengan ketinggian di atas 1500 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Nabire memiliki iklim tropis lembab dengan curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun. Faktor ini terpengaruh oleh kondisi suhu dan ketinggian udara di area tersebut. Ketinggian udara naik sekitar  $0,60^{\circ}\text{C}$  per 100 meter di atas Kabupaten Nabire.

Topografi dataran tinggi yang beragam juga memengaruhi suhu di Kabupaten Nabire, yang berkisar antara 20 hingga  $32^{\circ}\text{C}$ , dengan suhu maksimum mencapai  $34^{\circ}\text{C}$ .

Curah hujan terjadi sepanjang tahun di Kabupaten Nabire. Cuaca di sebelah utara Kabupaten Nabire, terutama di daerah pantai yang berhadapan dengan pegunungan, umumnya dipengaruhi oleh angin lokal yang dominan.

Hal ini menghasilkan sedikit variasi musim atau perbedaan cuaca hampir setiap bulan di sebelah utara Nabire atau di dalam kota Nabire. Rata-rata terdapat 18 hari hujan dalam sebulan. Pada bagian selatan, kadang-kadang terdapat siklon lokal yang dapat membahayakan helikopter atau pesawat yang terbang dengan ketinggian rendah.

Kabupaten Nabire memiliki topografi yang beragam, dengan sekitar 47% wilayah datar di sepanjang pantai dan sekitar 53% wilayah berbukit di pedalaman (pegunungan). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Balai Penelitian Tanah (Badan Pertanahan) Bogor pada tahun 1964, terdapat beberapa jenis tanah di Kabupaten Nabire, yaitu:

- a. Wilayah Nabire: Sebagian besar wilayah ini terdiri dari jenis tanah endapan alluvial dan tanah Potzolic. Terdapat juga daerah yang sering tergenang air, di mana tanahnya termasuk tanah BOG dan LOW Humiegley yang pada dasarnya adalah tanah yang terbentuk dari endapan sungai.
- b. Wilayah Jarre: Di wilayah ini terdapat jenis tanah dengan pupuk kalium merah-kuning dan tanah berair berwarna abu-abu.
- c. Daerah pedalaman: Sebagian besar wilayah pedalaman memiliki jenis tanah Potzolic dan tanah coklat, dengan kondisi air yang berwarna abu-abu.

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai komposisi tanah di Kabupaten Nabire, namun perlu dicatat bahwa data tersebut berasal dari penelitian tahun 1964 dan kondisi tanah mungkin telah mengalami perubahan sejak itu.<sup>66</sup>

#### 4.1.4. Demografi Provinsi Papua Tengah

Menurut informasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua mengenai hasil sensus, jumlah penduduk di setiap daerah di Kabupaten Provinsi Papua Tengah dari tahun 2020 hingga 2021 adalah sebagai berikut: Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Nabire mencapai 169.136 orang, Mimika dengan jumlah penduduk sebanyak 311.969 jiwa, Dogiyai dengan jumlah penduduk sebanyak 116.206 jiwa. Intan Jaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 135.043 jiwa, Deiyai sebanyak 99.091 jiwa, Puncak sebanyak 114.741 jiwa, dan Puncak Jaya sebanyak 224.527 jiwa.

**Tabel 4. 2** Jumlah Penduduk Proyeksi (Jiwa)

Kabupaten	Jumlah Penduduk Proyeksi (jiwa)	
	2020	2021
Nabire	169.139	170.914
Paniai	220.410	223.467
Mimika	311.969	316.295
Dogiyai	116.206	117.818
Intan Jaya	135.043	136.916
Deiyai	99.091	100.466
Puncak	114.741	115.474
Puncak Jaya	224.527	227.641

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Tahun 2020-2021

<sup>66</sup><https://nabirekab.go.id/portal/geografis/> . diakses pada Rabu, 7 Juni 2023

Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, hasil sensus yang telah dipublikasikan menyatakan bahwa, jumlah penduduk di setiap daerah di Kabupaten Provinsi Papua Tengah dari tahun 2020 hingga 2021 adalah sebagai berikut: Pada tahun tersebut, Kabupaten Paniai memiliki jumlah penduduk sebanyak 223.467 jiwa. Kabupaten Nabire memiliki jumlah penduduk sebanyak 170.914 jiwa, Mimika sebanyak 316.295 jiwa, Dogiayai sebanyak 117.818 jiwa. Intan Jaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 136.916 jiwa, Deiyai sebanyak 100.466 jiwa, Puncak sebanyak 115.474 jiwa, dan Puncak Jaya sebanyak 227.641 jiwa.

Kabupaten	[Hasil Sensus Penduduk 2020] Jumlah Penduduk Hasil Sp Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-laki 2020	Perempuan 2020	Jumlah 2020
Merauke	120 868	110 064	230 932
Jayawilaya	140 584	128 969	269 553
Jayapura	86 742	79 429	166 171
Nabire	89 048	80 888	169 936
Kepulauan Yapen	58 496	54 180	112 676
Biak Numfor	69 060	65 590	134 650
Paniai	120 893	99 517	220 410
Puncak Jaya	121 271	103 256	224 527
Mimika	170 550	141 419	311 969
Boven Digoel	34 189	30 096	64 285
Mappi	55 918	52 377	108 295
Asmat	57 116	52 989	110 105
Yahukimo	191 657	159 323	350 880
Pegunungan Bintang	42 172	35 700	77 872
Tolikara	129 039	107 947	236 986
Sarmi	22 116	19 399	41 515
Keerom	32 530	29 093	61 623
Waropen	18 002	15 941	33 943
Supiori	11 729	10 818	22 547
Mamberamo Raya	19 148	17 335	36 483
Nuausa	58 084	48 449	106 533
Lamya Jaya	106 818	89 581	196 399
Mamberamo Tengah	26 823	23 862	50 685
Yalimo	54 313	47 660	101 973
Puncak	69 845	53 896	114 741
Dogiayai	60 682	55 524	116 206
Intan Jaya	71 165	63 878	135 043
Deiyai	52 617	46 474	99 091
Kota Jayapura	212 438	186 040	398 478
Provinsi Papua	2 294 813	2 008 894	4 303 707

**Gambar 4. 2** Jumlah Penduduk Papua menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

Sumber : Data Sensus 2020 Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Tahun 2020

Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, hasil sensus yang telah dipublikasikan tahun 2020 menyatakan, mengalami peningkatan sebesar 4,3 juta jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tabel di atas memperlihatkan jumlah penduduk Provinsi Papua berdasarkan Kabupaten/Kota dan jenis kelamin (jiwa). Terdapat 2.294.813 jiwa penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dan 2.008.894 jiwa penduduk dengan jenis kelamin perempuan.

Kabupaten Nabire terletak di Teluk Cendrawasih, Papua, dan merupakan salah satu dari tujuh kabupaten sentral di wilayah Papua. Kabupaten ini memegang peranan penting sebagai titik akses masuk dan keluar bagi kabupaten-kabupaten tetangga di Provinsi Papua Tengah, termasuk Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Kabupaten Intan Jaya, yang dapat dijangkau melalui Nabire. Selain itu, Nabire juga berfungsi sebagai pintu masuk bagi penduduk non-Papua, berkat tersedianya akses transportasi udara, darat, dan laut di dalam kabupaten ini. Dengan keadaan ini, Nabire dianggap sebagai pintu gerbang yang mewakili Indonesia dalam skala kecil.

Sejak zaman dahulu, Kabupaten Nabire telah dihuni oleh sembilan suku asli yang berbeda. Enam suku berasal dari wilayah Nabire Pesisir dan Kepulauan, yaitu suku Wate, Yerisyam, Hugure, Umari, Goa, dan Mora. Sementara itu, tiga suku berasal dari wilayah Nabire gunung, yaitu suku Mee, Auye, dan Moi. Jika melihat lebih dalam ke dalam wilayah adat, terdapat

perbedaan yang lebih detail. Enam suku berasal dari wilayah Saireri dan tiga suku berasal dari wilayah Meepago, sesuai dengan pemetaan tujuh wilayah adat yang dibentuk oleh pemerintah setelah diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Nomor 21 tahun 2001.<sup>67</sup>

#### 4.1.5. Sosial Budaya

Keragaman agama yang ada di kalangan penduduk Kabupaten Nabire membutuhkan sikap toleransi dan harmoni untuk menciptakan kedamaian di tengah masyarakat. Meskipun informasi yang akurat mengenai jumlah pemeluk agama belum tersedia, data yang diberikan di bawah ini masih perlu diteliti dan dipelajari dengan cermat. Berdasarkan analisis terkait jumlah tempat ibadah, dapat diasumsikan bahwa mayoritas pemeluk agama di Kabupaten Nabire adalah Kristen Protestan.

Agama adalah sebuah sistem ajaran yang mengarahkan manusia untuk kembali kepada esensi kemanusiaannya yang sejati. Memiliki keyakinan beragama berarti berusaha belajar dan mengamalkan ajaran agama dalam segala aspek kehidupan, dengan tujuan terciptanya hubungan yang indah dan harmonis antara sesama, alam semesta, dan dengan Tuhan.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Suroso, "Menyikapi 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Mencari Identitas Adat Mereka di Nabire", <https://pauaposnabire.com/article/read/11100-minyikapi6sukupesisirdankepuluanmencariidentitasadatmerekadinabire> . diakses pada Rabu, 7 Juni 2023

<sup>68</sup> <https://kemenag.go.id/khonghucu/peranan-agama-dalam-kehidupan-keseharian-umat-3x23ay> . Diakses pada Rabu, 7 Juni 2023

**Tabel 4.3** Agama yang Dianut Penduduk di Provinsi Papua Tengah

Provinsi	Kristen	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
Papua Tengah	87,74 %	12,26%	68,59%	19,01%	0,07%	0,03%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022

Diperlukan upaya untuk menjaga layanan dan sarana ibadah yang memadai guna mendukung pertumbuhan iman dan ketakwaan. Berdasarkan tabel yang berasal dari Badan Pusat Statistik tahun 2022 untuk Provinsi Papua Tengah, persentase penganut agama Kristen sebanyak 87,74%, penganut agama Islam sebanyak 12,26%, penganut agama Protestan sebanyak 68,59%, penganut agama Katolik sebanyak 19,01%, penganut agama Hindu sebanyak 0,07%, dan penganut agama Buddha sebanyak 0,03%. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Nabire tetap berfokus pada pemberian bantuan pembangunan rumah/tempat ibadah. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan dukungan untuk kegiatan keagamaan yang diikuti oleh masing-masing agama, seperti Pesarawi, Wisata Rohani, MTQ, dan Utsawa Dharma Gita.<sup>69</sup>

#### **4.1.6. Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum adalah mekanisme demokratis yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara berdasarkan keinginan rakyat. Pemerintahan negara yang terbentuk melalui Pemilihan Umum mencerminkan

<sup>69</sup> <https://nabirekab.go.id/portal/keagamaan/> . Diakses pada Rabu, 7 Juni 2023

aspirasi rakyat, dilaksanakan dengan memperhatikan preferensi mereka, dan berdedikasi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.<sup>70</sup>

Sistem Noken digunakan secara khusus dalam Pemilihan Umum wilayah Provinsi Papua. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggap Noken sebagai aspek penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Papua, khususnya untuk penduduk Papua yang berasal dari wilayah pegunungan. Sistem Noken secara langsung terhubung dengan para pemimpin tradisional karena di Papua, masyarakat terdiri dari komunitas tradisional yang mengandalkan keputusan dari para tetua atau pemimpin suku.

Dalam penerapan sistem Noken, terdapat dua pendekatan yang diterapkan, yaitu Noken Big Man dan Noken Gantung. Noken Big Man mengimplikasikan penyerahan atau delegasi semua suara kepada kepala suku. Pendekatan ini umumnya terjadi di masyarakat Pegunungan Tengah yang diidentifikasi oleh para ahli antropologi sebagai tipe Big Man. Dalam bahasa setempat, istilah 'Big Man' mengartikan seseorang yang memiliki wibawa. Posisi seorang Big Man sebagai pemimpin tidak diturunkan secara turun-temurun melainkan diperoleh melalui perilaku, tindakan, dan usaha untuk melebihi orang lain atau pesaing. Di Papua, seseorang yang memimpin di satu kampung belum tentu dianggap sebagai pemimpin di kampung lainnya.

---

<sup>70</sup><https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/3TAHUN~1999UUPenj.htm#:~:text=Pemilihan%20Umum%20merupakan%20sarana%20demokrasi,dan%20diabdikan%20untuk%20kesejahteraan%20rakyat.>

Diakses pada Rabu, 7 Juni 2023



Seorang pemimpin lintas kampung adalah individu yang memiliki keterampilan diplomasi dalam berhubungan dengan pemimpin dari kampung lain, membentuk kemitraan, menghormati otoritas, dan tidak mencela pemimpin lain. Keahlian dalam diplomasi dan membangun hubungan kerjasama membuat seorang Big Man dihormati oleh Big Man lainnya.

Sementara itu, dalam sistem Noken Gantung, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyaksikan kesepakatan dan keputusan bersama selama proses pemilihan. Sistem pemilihan Noken menjadi lambang utama dari pentingnya musyawarah dalam membentuk opini di Papua, di mana transparansi menjadi hal utama, dan diskusi masyarakat berperan penting. Sebaliknya, dalam pendekatan Big Man, individu sepenuhnya menyerahkan keputusan pemilihan mereka kepada pemimpin sebagai tindakan ketaatan.

Pada tahun 2004, sistem Noken pertama kali diterapkan di 16 kabupaten di Provinsi Papua dalam sebuah pemilihan. Beberapa alasan diadakannya pemilihan dengan sistem Noken ini adalah alasan pertama adalah faktor geografis. Daerah pedalaman Papua memiliki jarak yang sulit dan medan yang rumit untuk mendistribusikan logistik pemilu dengan cepat. Alasan kedua berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM). Beberapa masyarakat di wilayah pegunungan Papua tidak memiliki akses ke pendidikan formal.

Oleh karena itu, mereka memerlukan bimbingan dan arahan melalui proses pengambilan keputusan bersama selama prosedur pemilihan. Alasan ketiga melibatkan aspek sosial budaya. Budaya dan struktur sosial masyarakat

terpencil di Papua berpusat pada sistem politik tradisional yang disebut Big Man.

Dalam kehidupan masyarakat pegunungan Papua, Noken memiliki peran penting dan tak terpisahkan dalam rutinitas kehidupan mereka. Konsep ini kemudian dimaknai dalam konteks pemilu, di mana terdapat komitmen politik, kesepakatan bersama, dan dukungan penuh kepada calon tertentu melalui musyawarah mufakat.<sup>71</sup>



---

<sup>71</sup> <https://malangkota.bawaslu.go.id/sistem-noken-dalam-pemilihan-di-papua/> . diakses pada Rabu, 7 Juni 2023